

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap wartawan perang menurut hukum humaniter wartawan dikategorikan sebagai masyarakat sipil, yang berarti wartawan dalam menjalankan profesinya di area konflik mendapatkan hak-hak perlindungan sebagaimana yang didapatkan masyarakat sipil lainnya. Apabila terjadinya penyanderaan wartawan perang, maka wartawan tersebut akan dianggap sebagai tawanan perang, dimana tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi.
2. Tanggung jawab Negara Irak, *Belligerent/Insurgent*, dan perorangan terhadap penculikan dan penyanderaan wartawan perang asing di daerah konflik, khususnya dalam kasus penculikan dan penyanderaan dua wartawan Indonesia di Irak tahun 2005 adalah sebagai berikut :

Negara Irak melalui konstitusinya telah memberikan perlindungan terhadap individu yang ada wilayah negaranya baik secara umum maupun secara khusus. Namun terhadap kasus penculikan dan penyanderaan wartawan perang Indonesia, Meutiya Havid dan Budiyanto, jelas telah terjadinya pelanggaran aturan hukum, baik pelanggaran terhadap hukum nasional Irak maupun Hukum Humaniter Internasional, dan dalam hal ini

negara Irak telah lalai dalam melaksanakan aturan dalam konstitusinya untuk melindungi warga negara asing yang berada di wilayahnya sehingga menimbulkan tanggung jawab dari negara Irak terhadap penyanderaan dua wartawan Indonesia di wilayah kedaulatannya.

Kelompok Mujahidin yang melakukan tindakan penculikan dan penyanderaan terhadap Meutiya Hafid dan Budiyanto, pertanggungjawaban penghukuman hanya dapat diberikan oleh negara Irak melalui hukum nasionalnya, baik kelompok tersebut masih berstatus sebagai *insurgent* atau telah berubah sebagai *belligerent*, walaupun dengan diakuinya *belligerency* sebagai salah satu subjek hukum internasional, kelompok tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai entitas, karena *belligerent* hanya dianggap sebagai subjek hukum internasional selama perang berlangsung, dan kembali dianggap sebagai individu apabila perang telah berakhir, dan kelompok tersebut hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perorangan atau individu.

Pertanggungjawaban terhadap individu dalam hukum internasional dalam keadaan perang dapat dibagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab individu, yaitu tanggung jawab yang diberikan kepada orang pribadi yang secara langsung melakukan tindakan kejahatan perang. Tanggung jawab ini dapat diberikan baik kepada bawahan militer yang secara langsung melakukan kejahatan perang ataupun kepada komandan militer suatu angkatan perang yang memberikan perintah untuk melakukan tindakan kejahatan perang melalui bawahannya. Tanggung jawab komando adalah

tanggung jawab yang diberikan kepada komandan atau atasan perang terhadap tindakan kejahatan perang yang dilakukan oleh bawahannya, sementara ia sendiri memiliki kuasa atau dapat memberikan perintah untuk menghentikan tindakan kejahatan tersebut dalam arti lain komandan tersebut telah gagal untuk mengendalikan secara benar pasukan-pasukannya tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran terhadap tanggung jawab negara terhadap penyanderaan wartawan perang di luar negeri sebagai berikut :

1. Negara Indonesia sebagai negara yang dirugikan terhadap tindakan penculikan dan penyanderaan terhadap warga negaranya dapat memintakan pemenuhan tanggung jawab dari Negara Irak. Negara Irak dapat dimintakan kewajiban untuk melakukan pelunasan atau *satisfaction* melalui perundingan-perundingan diplomatik, permintaan maaf secara resmi ataupun dengan pemberian jaminan bahwa persoalan yang diprotes tersebut tidak akan berulang lagi.
2. Indonesia harus meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara lain dengan membuat perjanjian-perjanjian khusus mengenai perlindungan warga negaranya di luar negeri, sehingga pemberian perlindungan warga negara tidak hanya sebatas usaha yang dilakukan oleh Indonesia itu sendiri, namun juga negara yang telah diajak bekerja sama dapat memberikan bantuan terhadap penjaminan perlindungan warga negara asing yang berada

di teritorialnya dan Indonesia dalam setiap hubungan luar negerinya harus membuat kesepakatan mengenai pemberian tanggung jawab berupa ganti rugi apabila warga negaranya yang berada di luar negeri dirugikan secara moril dan materill.

